



# Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi Perdagangan Jasa

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JAKARTA, Juli 2013

1



## Outline

Globalisasi ekonomi

Dampak perdagangan bebas bagi sektor usaha

Kondisi Ketenagakerjaan

Penguatan dan pemberdayaan TK

Kebijakan Ketenagakerjaan

2



## Pembangunan Ketenagakerjaan

- Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

3



## Globalisasi Ekonomi: liberalisasi perdagangan barang dan jasa antar negara

Perdagangan barang dan Jasa

Pembukaan pasar bagi barang dan jasa antar negara lain

Bilateral

WTO

AFAS

4

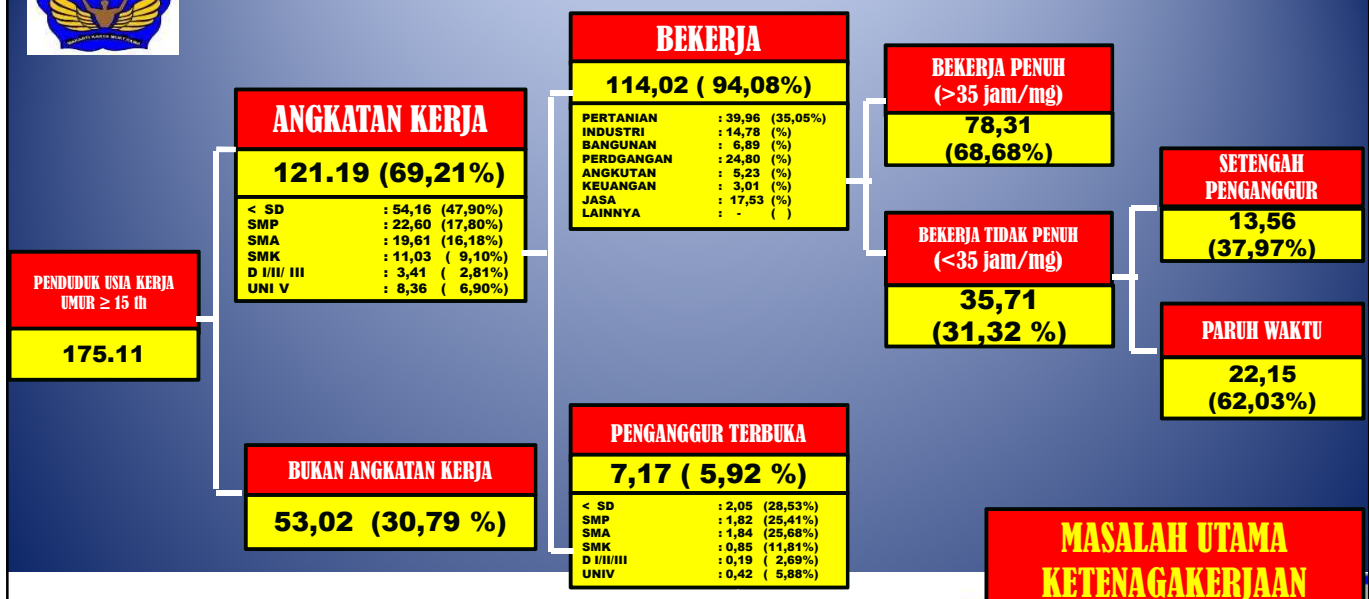


## DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS

- Sektor usaha akibat dampak perdagangan bebas:
  - a. Industri tekstil dan produk tekstil,
  - b. alas kaki,
  - c. elektronik,
  - d. baja,
  - e. kosmetik dan petrokimia.
  - f. Padat karya (terancam gulung tikar)



## KONDISI KETENAGAKERJAAN TAHUN 2013



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Februari 2013, Diolah Pusdatinaker



## .....Lanjutan

- Jumlah Angkatan Kerja : 121,19 jt  
masih didominasi lulusan SD ke bawah : 56,67 jt
- Jumlah penduduk yang bekerja : 39,96 juta mayoritas di sektor pertanian.
- Besarnya pengangguran Jumlah penganggur : 7,17 juta didominasi dengan pendidikan di bawah SD

BPS Sakernas, Februari 2013

7



## Faktor Penyebab Pengangguran

1. Jumlah angkatan kerja baru cukup besar
2. Keterbatasan kesempatan kerja baru yang dapat diciptakan
3. Pengurangan jumlah kesempatan kerja akibat PHK

8





## Penguatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengembangan penguatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia melalui:

- a. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pengembangan standar kompetensi
- b. Revitalisasi pelatihan yang berkaitan dengan kurikulum, instruktur dan sarana.
- c. Penataan regulasi yang memberikan kemudahan mobilitas tenaga kerja Indonesia.
- d. Penguatan kelembagaan pelatihan, promosi dan informasi

9



## Kebijakan Ketenagakerjaan

- A. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja melalui:
  - PP No. 23 tahun 2004 tentang Pembentukan BNSP  
→  $\pm 210$  standar sudah ditetapkan
  - Permenakertrans No. 8/MEN/X/2012 tentang SKKNI
- B. Peningkatan kualitas SDM:
  - 18 Balai Latihan Kerja (UPTP) dan 237 BLK (UPTD).

10



# Terima Kasih